

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A'an Efendi dan Freddy Poernomo. 2019. *Hukum Administrasi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Abdul Razak. 2021. *Kedudukan Peraturan Kebijakan dalam Hukum Administrasi Negara*. Penerbit Litera. Yogyakarta.
- Adrian Sutedi. 2015. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- A. M. Yunus Wahid. 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Prenadamedia Group. Jakarta Timur.
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih. 2016. *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Bambang Pujo Purwoko. 2021. *Seri Ikhtisar Hukum Ekonomi dan Bisnis Buku 11 Bentuk-Bentuk Perusahaan*. CV. Amal Saleh. Serang.
- Diana Halim Koentjoro. 2004. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- I Nyoman Gede Remaja. 2017. *Hukum Administrasi Negara*. Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti. Bali.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*. Mitra Buana Media. Yogyakarta.
- Kurhayadi, Yeti Rohayati, Bambang Sucipto. 2020. *Kebijakan Publik di Era Digitalisasi*. CV. Insan Cendekia Mandiri. Solok.
- Muhammad Sadi dan Kun Budianto, 2021. *Hukum Administrasi*. Kencana. Jakarta.
- HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. PT. RajaGrafindo Persada. Depok.



Sigit Sapto Nugroho dan Anik Tri Haryani. 2021. *Hukum Perizinan Berbasis OSS (Online Single Submission)*. Penerbit Lakeisha. Klaten.

Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo. 2016. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. PrenadaMedia. Jakarta.

Tomo. 2020. *Evaluasi Implementasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Daerah*. Indocamp. Tangerang Selatan.

Victorianus M.H Randa Puang. 2015. *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*. Deepublish. Yogyakarta.

Y. Sri Pudyatmoko. 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*. PT. Gramedia Widiasarana. Jakarta.

Jurnal

Arini Nur Annisa dkk, 2022 "Government Supervisoin of The Rights Fulfillment of Housed Workers in The Transition Period", Awang Long Law Review, Faculty of Law Hasanuddin University, Vol. 5, No. 1.

Erni dan Febri Jaya, 2022, "Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Kemudahan Berusaha", Jurnal Wajah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Vol. 6, Nomor 1.

Galih Orlando, 2022, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia", Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Bukhary Labuhanbatu, Vol. VI, Edisi 1.

Ida Ayu Kade Febriana Dharmayanti dan Puti Gede Arya Sumerta Yasa, 2022 "Penerapan Sistem Perizinan Berusaha *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) di Bidang Industri", Jurnal Komunikasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 8, Nomor 1.

Mai Puspadya Bilyastuti, 2019, "Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ponorogo dengan SIJITU (Sistem Informasi Perizinan Terpadu)", Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tribhuwana Tungadewi, Vol.9, Nomor 1.



Ni Nyoman Nia Oktaviani dan Putu Gede Arya Sumerta Yasa, 2022, “Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri dan Menengah (IKM)”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 10, Nomor 1.

Winda Fitri dan Sheerleen, 2021, “Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum di Indonesia”, Jurnal Komunikasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Vol. 7, Nomor 1.

Skripsi

Andi Arkham Putra. 2015. *Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Pemberian Izin Usaha Industri di Kabupaten Bone*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Ayu Amelia. 2019. *Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri Kecil oleh Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian di Kota Pekanbaru*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Pekanbaru.

Suci Ramdhani, 2023. *Pengawasan terhadap Izin Usaha Industri Peternakan Unggas di Permukiman (Studi Kasus Kabupaten Pinrang)*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Website

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang, 2021, “Permohonan Izin Usaha Melalui OSS”, Sumber: https://pmptsp.pinrangkab.go.id/assets/file/1663995628_1fbb6ce17ab0eb9f42ec.pdf, Diakses pada 13 Juni 2023.

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, “Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Dampak Berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, Sumber: https://bphn.go.id/data/documents/ae_tentang_perindustrian_2021.pdf diakses pada 12 Maret, pukul 15.30 WITA.



Kementerian Investasi/BKPM, “Mekanisme Pengawasan”, Sumber: <https://oss.go.id/informasi/mechanism-pengawasan> diakses pada 9 Oktober 2023, pukul 23.05 WITA.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia, “Kementan: Ketersediaan Telur Ayam Ras di Wilayah Indonesia Timur Aman dan Mencukupi” Sumber: <https://ditjenpkh.pertanian.go.id/berita/1559-kementan-ketersediaan-telur-ayam-ras-di-indonesia-wilayah-timur-aman-dan-mencukupi> diakses pada 12 Maret 2023, pukul 15.02 WITA

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, “Tumbuh Lampau 5 Persen, Industri Manufaktur Berjasa Besar Katrol Kinerja Ekonomi” Sumber: <https://kemenperin.go.id/artikel/23851/Tumbuh-Lampau-5-Persen,-Industri-Manufaktur-Berjasa-Besar-Katrol-Kinerja-Ekonomi> diakses pada 7 Maret 2023, pukul 21.14 WITA.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang RI Nomor Tahun 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan idang Perindustrian.



in Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan elayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha.



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO.5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) – 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

SURAT KETERANGAN

Nomor : 510 / 442 / DPMTSP / IX / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : AKBAR ABD KADIR
NIM / Jurusan : B021191063
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UNHAS
Alamat : Dsn I Anabanna, Desa Anabanna, Kec. Pitu Riawa

Telah melaksanakan penelitian pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu judul yang telah ditetapkan terhitung sejak tanggal 20 Juli 2023 s/d 20 Agustus 2023, dengan judul :

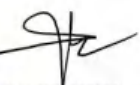
“ANALISIS HUKUM TERHADAP IZIN USAHA INDUSTRI PEMBUATAN RAK TELUR DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG”.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikam kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene Sidenreng, 01 September 2023

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu




Drs. H. LABENGNGA, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 199003 1 126



